

Ngawi Simpan Banyak Situs Cagar Budaya

NGAWI (KR) - Kabupaten Ngawi Jawa Timur menyimpan banyak bukti sejarah perjuangan kemerdekaan. Tak heran, wilayah dengan 128 ribu kilometer persegi tersebut memiliki 263 situs dan cagar budaya. Baik berupa bangunan, situs hingga kebudayaan.

Langkah-langkah pelestarian ini sejalan dengan Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian, Pengembangan Cagar Budaya dan Seni Tradisional. Saat ini yang menjadi skala prioritas adalah pengembangan situs cagar budaya Benteng Van Den Bosch atau Benteng Pendem. "Benteng ini dibangun pada tahun 1830-1839. Dimanakah Benteng Pendem, karena dari kejauhan memang tidak terlihat karena tertutup tanggul. Pada zaman Belanda, benteng ini dimanfaatkan untuk benteng bertahan dan menyimpan lo-



KR-Atiek Widyastuti H
Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto (kiri) memberikan Wayang Werkudara kepada Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono.

gistik," kata Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono ketika menerima kunjungan Komisi A DPRD DIY bersama wartawan unit DPRD DIY di pendopo kantor dinas bupati, Jumat (14/1).

Selain Bupati, hadir juga Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko dan Ketua DPRD Ngawi Heru Kusnandar. Ony mengatakan, upaya restorasi ini sejalan dengan keputusan

Permendikbud 2108 dengan dana yang dikeluarkan mencapai Rp 170 miliar yang semuanya bersumber dari APBN.

Selain itu, Pemkab Ngawi juga selesai memugar rumah Dr KRT Radjiman Wedyodiningrat selaku Ketua Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan (BPUPK). Rumah tersebut kini menjadi tempat wisata baru di Kabupaten Ngawi.

"Kami memang memberikan perhatian lebih terhadap situs-situs peninggalan sejarah. Tujuannya agar bukti sejarah tidak sampai hilang dan dapat menjadi tempat belajar generasi muda," ungkapnya.

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mengatakan, kunjungan ini menjadi bagian dari proses penyusunan Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang menjadi inisiatif DPRD. Salah satunya dengan belajar langsung ke Kabupaten Ngawi yang ternyata memiliki banyak bukti sejarah.

"Kenapa kami berinisiatif membuat Perda ini, karena aspek sejarah itu penting. Selain ilmu kebudayaan dan kejuangan, kita membutuhkan pengetahuan tentang sejarah agar kita tetap bermotivasi untuk terus belajar," ungkapnya. (Awh)-f



KR-Surya Adi Lesmana
PLENGKUNG WIJILAN: Pengendara melintasi Plengkung Tarunasura atau biasa disebut Plengkung Wijilan, Yogyakarta, Jumat (14/1). Belum lama ini bangunan ikonik khas Yogyakarta tersebut mendapatkan perawatan untuk mengembalikan wajah aslinya bersama bangunan bersejarah di DIY termasuk Kraton Yogyakarta yang juga sedang direnovasi agar tampil lebih mempesona.

Rektor

"Kami (UIN Suka) juga menyerukan yang berwajib untuk menghentikan proses hukum pada HD mengingat di Indonesia masih banyak pelaku pelanggaran hukum, HAM berat yang merugikan negara justru belum diproses," tegasnya. Diakui, berdasar Sistem Informasi Akademik, HD pernah kuliah di UIN Suka sebagai mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Angkatan 2008. "HD pernah kuliah sampai Semester 6, tahun 2011 sudah tidak melakukan pembayaran sampai 2013-2014 tidak daftar ulang, hingga dinyatakan drop out (DO) 24 Mei 2014," terang Rektor.

HD dengan ijazah S1 dari kampus lain

juga pernah mendaftarkan S2 Program Pendidikan Agama Islam di UIN Suka namun tidak melakukan daftar ulang. "Karena sudah sangat lama sekali kita tidak mengetahui rekam jejak HD selama kuliah di UIN," jelas Prof Sri Sumarni selaku dekan dimana HD pernah kuliah.

Al Makin menegaskan, UIN Suka sangat kecewa dengan perilaku HD. Namun demikian pihaknya tetap meminta masyarakat untuk menghentikan hujatan pada HD. "Dengan sikap memaafkan dari masyarakat, kita berharap HD mendapat pelajaran bahwa berbeda itu tidak apa-apa," ucap Rektor yang banyak melakukan penelitian keberagaman misalnya Lia Eden, Gafatar, Ahmadiyah,

dan lainnya ini.

Rektor menunjukkan selama periode kepemimpinannya 2020-2024, UIN Suka mengutamakan keragaman seperti misal ada pameran keragaman 106 pelukis. "Mahasiswa dan pengajar S1, S2, S3 juga banyak yang nonmuslim sesuai keilmuannya. Lebaran tahun lalu UIN Suka juga mengundang semua pemuka agama di Indonesia," jelasnya.

Dengan melihat masa depan HD yang masih panjang, Rektor berharap karakter HD jangan dibunuh dengan hujatan atau hukuman. "Bahkan jika HD bertobat dan menjadi sosok yang toleran, kalau dia menjadi lulus tes masuk UIN Suka tentu kita terima," tegasnya. (Vin)-f

Sambungan hal 1

Mulai

"Jadi kami menunggu nanti untuk nama-namanya yang memang masuk dalam kewenangan kami," tutur Andika.

Proyek Satelit Kemenhan itu terjadi pada tahun 2015. Proyek itu berkaitan dengan pengelolaan satelit untuk slot orbit 123 derajat Bujur Timur. Mengenai dugaan pelanggaran dalam Proyek Satelit Kemenhan ini diungkapkan oleh Menkopolkum Mahfud MD, Kamis (13/1).

Usai bertemu Jaksa Agung Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal TNI

Andika Perkasa menyampaikan dukungannya atas kewenangan Kejaksaan dalam penegakan hukum termasuk penyelesaian perkara koneksitas dan HAM. "Kita (TNI) all out mendukung proses hukum koneksitas, kita mendukung penuh apa yang diminta Kejaksaan Agung," tegasnya.

Andika juga mengungkapkan salah satu tujuan kedatangannya bertemu Jaksa Agung untuk membahas peran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer (JAMPidmil) yang baru terbentuk pertengahan 2021. "Jadi, kedatangan saya pagi ini juga untuk membuat dua institusi ini saling memahami, saya berikan statemen kepada Jaksa Agung, kita siap mendukung semua kewenangan Kejaksaan Agung, terkait HAM kita all out," ujar Andika.

Sejak diresmikan Juli 2021, JAMPidmil resmi dipimpin perwira tinggi TNI, yakni Laksda TNI Anwar Saadi. Saat pelantikan disebutkan ada sekitar 2.000 perkara koneksitas yang perlu diselesaikan JAMPidmil. (Ful)-d

Sambungan hal 1

Keterwakilan

keterwakilan perempuan di wilayah-wilayah strategis yang bersinggungan langsung dengan penentuan kebijakan publik. Sebagian masyarakat masih meyakini bahwa ruang gerak perempuan yang masuk dalam arena publik tidak akan memberikan kontribusi yang signifikan. Cara pandang ini tentunya dilatarbelakangi stigma kultural, dimana peran perempuan haruslah dibatasi. Karena laki-laki yang memiliki peran lebih besar untuk mengendalikan serta mengatur kehidupan publik dalam konteks pembentukan kebijakan yang bersinggungan dengan hajat hidup.

Proses untuk mengalienasi paradigma diskriminatif atas perempuan harus menjadi krenteg (keinginan) bersama. Dan negara setidaknya dalam hal ini telah menunjukkan *political will*-nya yakni dengan kembali mendorong pemenuhan kuota 30% bagi calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tercatat dari empat belas nama calon anggota KPU, ada empat nama perempuan di antaranya dan dari sepuluh calon anggota Bawaslu, ada 3 perempuan yang tercatat sebagai kandidat. Komposisi ini diharapkan mampu bertahan hingga nantinya secara definitif ditetapkan para calon tersebut sebagai komisioner KPU dan Bawaslu.

Pola keterwakilan ini memang menjadi amanat dari UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang secara tersurat mengamanatkan adanya komposisi keterwakilan perempuan di KPU dan Bawaslu. Pola pengamanatan ini tentu tidak hanya berhenti pada proses seleksi KPU dan Bawaslu di tingkat pusat. Namun secara birokratif juga harus dilakukan sampai tingkat Kabupaten dan Kota, bahkan tidak menutup kemungkinan para anggota KPPS maupun PPS.

Keterlibatan perempuan dalam arena publik yang sarat dengan paradigma maskulinitas menjadi tanda bahwa arena publik, dalam hal ini panggung politik bukanlah wilayah menjadi domain dari laki-laki *ansich*. Anne Philips (1995) dalam *The Politics of Presence* memberikan pandangan yang cukup gamblang bahwa keterwakilan perempuan politisi memiliki kelengkapan yang terbaik untuk kepentingan kaumnya.

Pemahaman tersebut menandakan bahwa hanya perempuanlah yang bisa memahami dengan presisi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Perspektif tersebut juga berkorelasi secara langsung dengan isu representasi secara deskriptif dan substantif. Representasi deskriptif berbicara mengenai kuantitas keterwakilan perempuan dalam ruang publik, dalam hal ini khususnya arena politik-pe-

merintahan. Kemudian dalam nalar rasional maka semakin banyak kuantitas keterwakilan akan mendorong tercapainya representasi substantif, yakni tercapainya afirmasi kepentingan perempuan di ruang publik. Mereka tidak lagi berdiri sebagai pelengkap kuota dalam suatu kepentingan politik.

Adanya keadilan atau kesetaraan jender bagi perempuan dalam wilayah pengambilan kebijakan publik menjadi keniscayaan bagi negara yang menganut sistem demokrasi. Negara dan partai politik harus lebih konsisten untuk memberikan *political literate* kepada publik agar mereka tidak lagi membaca dengan cara pandang yang salah atas keterlibatan perempuan di ruang publik. Perempuan harus menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan strategis. Bahkan ke depan tidak perlu lagi ada istilah pemenuhan kuota perempuan. Pernyataan ini sebenarnya hanya menegaskan bahwa perempuan selalu menjadi *second line*, karena menjadi aktor strategis di wilayah publik adalah keniscayaan bagi siapapun, tidak terkecuali perempuan. Maka sudah sepatutnya jika ruang itu diisi oleh laki-laki dan perempuan secara adil.

(Penulis adalah Peneliti Sosial Politik PSP UGM dan Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Sleman)-d

Sambungan hal 1

Sebulan,

"Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum kembali ke dalam rumah," katanya.

Dari tingkat guncangan sejumlah wilayah merasakan getaran mulai dari skala II hingga VI Modified Mercalli Intensity (MMI).

Skala VI MMI dirasakan di daerah Cikeusik dan Panimbang. Pada skala ini, getaran dirasakan hampir semua orang ditandai dengan barang terpelanting, tiang dan barang besar bergoyang. Skala IV MMI dirasakan di wilayah Labuan dan Sumur. Pada skala ini gempa dirasakan banyak orang di dalam rumah, di luar

rumah, serta ditandai antara lain jendela atau pintu berderik dan dan dinding berbunyi.

Skala III hingga IV MMI dirasakan di Tangerang Selatan, Lembang, Kota Bogor, Pelabuhan Ratu, Kalianda, Anyer, dan Bandar Lampung yang ditandai getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu.

Skala II sampai III MMI dirasakan di Jakarta, Kota Tangerang, Ciracas, Bekasi, Kota Bandung, Kab. Bogor, Kota Bumi yang ditandai dengan getaran dirasakan nyata di dalam rumah dan benda-benda ringan atau yang menggantung bergoyang, demikian Dwikorita Kamawati. (Ati/Ant)-d

Sambungan hal 1

KPK

pada Gedung Merah Putih KPK, Plt Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara Mulyadi (M) ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur.

Kemudian, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Edi Hasmoro (EH) ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat, Kepala Bidang Disdikpora Kabupaten Penajam Paser Utara Jusman (JM) ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat dan tersangka Achmad Zuhdi alias Yudi (AZ) dari pihak swasta ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan, Kabupaten Penajam Paser Utara mengagendakan beberapa proyek pekerjaan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara dan Disdikpora Penajam Paser Utara.

Adapun nilai kontraknya Rp 112 miliar antara lain untuk proyek 'multiyears' peningkatan Jalan Sotek-Bukit Subur dengan nilai kontrak Rp 58 miliar dan pembangunan gedung perpus-

takaan dengan nilai kontrak Rp 9,9 miliar.

Atas adanya beberapa proyek tersebut, tersangka Abdul Gafur diduga memerintahkan tersangka Mulyadi, tersangka Edi dan tersangka Jusman untuk mengumpulkan sejumlah uang dari para rekanan yang sudah mengerjakan beberapa proyek fisik di Kabupaten Penajam Paser Utara. Selain itu, tersangka Abdul Gafur diduga juga menerima sejumlah uang atas penerbitan beberapa perizinan antara lain perizinan untuk Hak Guna Usaha (HGU) lahan sawit di Kabupaten Penajam Paser Utara dan perizinan *bleach plant* (pemecah batu) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara. (Ful)-f



Prakiraan Cuaca Sabtu, 15 Januari 2022

Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul	☁	☁	☁	☁	23-31	65-95
Sleman	☁	☁	☁	☁	22-30	65-95
Wates	☁	☁	☁	☁	23-31	65-95
Wonosari	☁	☁	☁	☁	23-30	65-95
Yogyakarta	☁	☁	☁	☁	23-31	65-95



Stara Asrita, SIKom, MA
Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta

FENOMENA laki-laki berparas cantik ala K-Pop terus menjadi perdebatan di masyarakat Indonesia. Laki-laki dianggap tidak boleh menggunakan skin care, make up dalam kesehariannya. Tidak hanya itu, laki-laki yang sangat memperhatikan penampilan seperti gaya rambut, pakaian dengan merek tertentu hingga menjaga pola makan akan menjadi bahan pembicaraan. Hal tersebut dikarenakan hanya perempuan yang merawat tubuh dan berdandan. Pandangan bahwa sejak kecil laki-laki harus beringkah laku seperti "pria sejati" adalah awal mula adanya toxic ini. Laki-laki diajarkan sejak dini untuk tidak terlalu memikirkan penampilan fisik. Mereka diminta untuk membiarkan tubuh mereka terbentuk alami oleh panas matahari, dingin air hujan, debu jalanan dan keringat yang menempel setelah seharian beraktivitas. Laki-laki harus memelihara kumis, jenggot, atau jambang. Katanya laki-laki seperti itulah yang akan dilihat lebih "macho" karena terbentuk natural. Wajar jika laki-laki tidak kenal apa itu perawatan wajah dan tubuh. Tidak hanya secara fisik, berbicara masalah maskulinitas juga mengarah ke relasi gender dalam sistem patriarki. Ideologi patriarki menempatkan laki-laki diatas perempuan dalam berbagai hal. Laki-laki harus kuat, mampu menjadi pemimpin, rasional, selalu tampil di ruang publik. Bahkan laki-laki seringkali dilarang untuk menunjukkan perasaan yang dianggap lemah seperti sedih atau menangis di depan umum. Budaya tersebut membuat laki-laki memiliki keterbatasan untuk mengungkapkan emosi sebagaimana manusia pada umumnya. Toxic masculinity adalah dapat diartikan sebagai ekspresi maskulinitas yang bersifat destruktif. Biasanya sudut pandang yang digunakan adalah "alpha male". Jadi, laki-laki harus berkuasa dan dominan dalam segala hal biasanya diatas perempuan. Pada akhirnya, konstruksi tersebut membuat laki-laki melakukan segala cara untuk dapat menunjukkan otoritasnya terhadap perempuan. Jika tidak dikontrol, laki-laki dapat melakukan diskriminasi, pelecehan hingga kekerasan seksual. Toxic masculinity juga dapat membentuk pola komunikasi dalam masyarakat seperti yang kita alami saat ini. Beberapa hal yang dilakukan tanpa disadari merupakan bentuk toxic masculinity seperti, sering mengejek teman laki-laki yang curhat masalah percintaan, melakukan perundungan terhadap laki-laki yang menangis, atau mencemooh laki-laki yang berpenampilan rapi. Semua itu dilakukan seseorang karena menganggap laki-laki seharusnya berperilaku sesuai dengan interpretasi masyarakat yang selama ini sudah dibangun. Laki-laki yang terus-menerus mendapat tekanan dari lingkungannya tidak menutup kemungkinan akan murung, sedih, bahkan depresi. Laki-laki juga memiliki hak untuk memilih ingin menjadi seperti apa dalam hidupnya. Kita tidak bisa hanya melihat dari sisi luar saja dan melakukan justifikasi terhadap laki-laki yang tidak sama dengan stereotip masyarakat. Keluarga menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga kesehatan mental seorang laki-laki. Untuk itu, kita harus menghargai sesama manusia tanpa harus menghakimi.***

Memahami Toxic Masculinity

